

Ulasan Buku

## Saifuddin atau Safiuddin?: Atau Jambi di Pinggir Sejarah<sup>1</sup>

**M. Husnul Abid**

*Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*

---

Elsbeth Locher-Scholten, *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*, terj. Noor Cholis, (Jakarta: KITLV dan Banana, 2008)

---

“Dalam sejarah, dehumanisasi tidak mungkin terjadi.”

—Kuntowijoyo

### **A. Pendahuluan**

Akhir-akhir ini diskusi tentang Jambi (kembali) digiatkan. Diskusi tersebut menghadirkan tetua adat, akademisi, peneliti, termasuk kalangan birokrat. Topik yang menonjol adalah persoalan identitas. Demi mengurainya, peserta diskusi sepakat melongok sejarah, walaupun kemudian mereka tersadar bahwa sejarah Jambi tidak banyak ditulis.

Dari yang sedikit, salah satu tulisan tentang sejarah Jambi adalah *Sumatraans sultanaat en koloniale staat: De relatie Djambi-Batavia (1830-1907) en het Nederlandse imperialisme* karangan Elsbeth Locher-

Scholten. Versi Indonesia buku tersebut terbit dengan judul *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*. Sumber terjemahan versi Indonesia adalah edisi Inggris, *Sumatran Sultanate and Colonial State: Jambi and the Rise of Dutch Imperialism, 1830-1907*.

Membaca judul buku tersebut, pertanyaan yang segera menghampiri adalah mengapa Locher-Scholten menyebut “imperialisme Belanda” (*Nederlandse imperialisme*) dan “negara kolonial” (*koloniale staat*)? Mengapa pula sejarah Jambi harus ditulis sebagai sejarah hubungan, yakni hubungan Jambi-Batavia?

Tulisan ini, dalam kapasitasnya yang tentu terbatas, punya ambisi memaparkan itu.

## **B. Sejarah Jambi: Sejarah Serangkaian Perjanjian**

Kontak pertama Jambi-bangsa Belanda sebenarnya telah terjadi jauh sebelum 1830, dalam hal ini yang dimaksud Belanda adalah Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Pada 1615 Jan Pieterzoon Coen, gubernur jenderal serikat dagang itu, mengirim dua kapal ke Jambi di bawah pimpinan kepala perwakilan dagang (*opperkoopman*) Sterck. Tujuan kunjungan adalah menyelidiki kemungkinan perdagangan di Jambi.<sup>2</sup>

Pada tahun-tahun itu, di Nusantara terjadi persaingan perdagangan antara Portugis-Inggris-Belanda. Sebagai pendatang baru, Belanda harus pandai bersiasat. Kedatangannya ke Jambi tak bisa dipisahkan dari persaingan dan siasat memenangkan persaingan tersebut, terlebih baru saja VOC ditolak untuk menjalin hubungan dengan Kesultanan Banten di ujung Pulau Jawa. Karena itu, mereka merasa perlu mencari “kawan” baru.

Ada dua strategi yang digunakan Belanda untuk menguatkan posisinya di Jambi. Pertama, membangun perwakilan dagang, yang terlaksana pada tahun kedatangan Belanda, tepatnya 15 September 1615. Pendirian perwakilan dagang ini tampaknya lebih bersifat “politis” ketimbang “ekonomis”, terutama karena Jambi bukanlah penghasil komoditas dan pelabuhan dagang terpenting. *Opperkoopman* Sterck dan Sourry menyebutkan, Jambi menjadi

penting karena merica yang dihasilkan petani pedalaman Minangkabau dibawa menyusuri sungai Batanghari. Dikatakan, tanpa itu, Jambi tak punya sesuatu yang ditawarkan di pasaran internasional. Pernah suatu waktu, orang Minang dari hulu tak datang, dan Jambi menjadi “mati”.

Jambi menjadi penting juga karena pelabuhan vital seperti Malaka dikuasai Portugis dan Belanda belum punya kekuasaan di mana pun. Taufik Abdullah menyebutkan, perwakilan dagang di Jambi adalah yang pertama milik Belanda. Sebagai yang pertama, tentu saja ia harus diperhatikan. Kelak ketika Malaka dan Palembang telah jatuh ke kekuasaan Belanda, perwakilan dagang di Jambi ditutup.

Kedua, membuat serangkaian kontrak atau perjanjian dengan penguasa di Jambi. Sejak pertama datang, yang dilakukan adalah meyakinkan “maksud baik” Belanda kepada penguasa Kerajaan Jambi sambil menghasut agar melarang Inggris berdagang di Jambi. Hasutan itu bisa dibilang tercapai, sebab raja menjamin meski “orang Inggris bebas berdagang, dia tidak mengizinkan sebidang tanah pun dipakai buat mendirikan gedung.” Dalam pengertian yang longgar, hal itu bisa disebut sebagai kontrak, meski tak ketat. Pada tahun-tahun ketika posisi Belanda telah kuat, kontrak dibuat sedemikian rupa sehingga menguntungkan Belanda.

Pembuatan perjanjian atau kontrak-kontrak dengan Jambi pada umumnya berlangsung mulus. Penyebabnya tak lain struktur internal Kerajaan Jambi yang lemah. Selain karena ada dua “raja” di Jambi, yakni “yang tua” bergelar sultan dan “yang muda” bergelar pangeran ratu, yang masing-masing punya daerah pendukung di pedalaman dan tanda kebesaran sendiri-sendiri; wibawa raja di hadapan rakyatnya sangat lemah. Di pedalaman, kewibawaan raja sangat tergantung pada kerja sama dengan penguasa daerah. Yang berpengaruh adalah *orang kaya* atau saudagar. Dalam konteks ini, perjanjian apa pun yang dibuat dengan kerajaan, tak bisa dijadikan jaminan pasti bagi Belanda.

Di samping itu, Jambi terlibat pertikaian kekuasaan dengan para tetangganya, yang boleh jadi bukan karena kehendak Jambi sendiri,

melainkan persaingan kerajaan-kerajaan di Nusantara bagian barat untuk menjadi kerajaan terkuat setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Di sini Jambi merupakan kerajaan yang lemah. Tentang kelemahan Jambi di hadapan para tetangganya, Taufik Abdullah mencatat:

Jambi dalam abad XVII itu adalah negeri yang sebetulnya sangat mudah diserang para tetangganya. Tidak seperti Aceh dan Mataram, untuk sebab yang berbeda muncul sebagai kerajaan yang kuat, Jambi harus selalu melindungi dirinya dari tetangga-tetangganya yang agresif. Supaya dapat berhadapan dengan ancaman yang tak pernah reda itu, sebagaimana kerajaan-kerajaan lemah lainnya, Jambi harus selalu mengikat dirinya dengan sekutu—yang selalu berubah-ubah—yakni kerajaan-kerajaan di sekitar kawasan itu. Dan jika perlu, ia harus mengakui kemaharajaan negeri lain yang lebih kuat.<sup>3</sup>

Karena kelemahan-kelemahan itu, setidaknya dua perjanjian telah ditandatangani pada fase pertama hubungan Jambi-Belanda, yakni sejak awal kedatangan hingga pada 1724 ketika VOC memutuskan mengosongkan kantor dagangnya di Jambi dan fokus ke Palembang dengan harapan dapat mengawasi Sumatera dari sana. Dua perjanjian itu ditandatangani pada 1630 untuk menentang kehadiran Portugis dan pada 1643 yang melarang orang Cina menyelenggarakan perdagangan di Jambi. Sementara pada fase kedua, serangkaian perjanjian dimulai pada 1833 dan 1834. Pada masa itu VOC telah dibubarkan. Perjanjian-perjanjian pada fase kedua tersebut oleh Elsbeth Locher-Scholten dilihat sebagai pintu masuk imperialisme atau upaya pembentukan negara kolonial.

### **C. Rapprochement: Sejarah dan Teori Sosial**

Imperialisme modern adalah istilah dalam historiografi untuk memaparkan periode 1870-1914, yakni saat negara-negara Barat merampas kekuasaan di wilayah-wilayah non-Barat, terutama Asia dan Afrika.<sup>4</sup>

Dari sekian banyak teori imperialisme, Locher-Scholten lebih memegang pendapat Fieldhouse. Di dalam bukunya, *Economics and Empire 1830-1914*, Fieldhouse mengemukakan setidaknya tiga hal. Pertama, imperialisme modern merupakan lanjutan atau produk hubungan-hubungan perdagangan dan kolonial terdahulu. Namun,

berbeda dari teoretisi lain, Fieldhouse tak mereduksi imperium sekadar imperialisme perdagangan bebas, melainkan lebih kompleks menyangkut kepentingan mendasar, yakni ekonomi, politik, dan keagamaan, yang belakangan dikenal sebagai 3G atau *gold, gospel, dan glory*. Sebagai sebuah kontinuitas, ketika membahas tentang imperialisme Belanda di Jambi, tidak bisa tidak telaah harus pula mencakup kondisi sebelum era imperialisme atau pra-1870, yang oleh Locher-Scholten ditetapkan 1830 atau awal fase kedua hubungan Jambi-Belanda. Sementara hubungan Jambi-Belanda atau, setelah fase kedua disebut, Jambi-Batavia—yakni Batavia sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda untuk membedakan dengan fase pertama Jambi-VOC—mutlak dilihat karena imperialisme merupakan produk hubungan.

Kedua, imperialisme sebagai ekspansi Eropa disebabkan krisis dan kebetulan di periferi; Eropa tersedot ke dalam kubangan imperialisme oleh kekuatan magnetik periferi. Teori ini menyanggah atau menjaga jarak dari kecenderungan Eurosentris, yakni persaingan antarnegara Eropa yang merembes ke negara lain di luar Eropa. Di sini,

Struktur Afrika-Asia tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan berkembang Eropa akan ikatan-ikatan ekonomi dan politik. Imperium kolonial muncul sebagai hasil respons spontan terhadap krisis yang melingkar cepat di periferi: para negarawan Eropa tidak bisa memikirkan reaksi lain kecuali pendudukan formal.<sup>5</sup>

Ketiga, Fieldhouse mengingatkan kembali soal peran ekonomi. Dia meyakini hampir setiap aksi ekspansi punya segi ekonomi. Di sini yang terjadi adalah problem ekonomi di periferi yang menjadi problem politik. Sebelum 1880<sup>6</sup> penyelesaian yang lebih disukai, berturut-turut, adalah perundingan, aksi militer terbatas, dan kontrol wilayah. Setelah 1880, pengontrolan dipilih, sebagian karena meningkatnya jumlah konflik di periferi yang diakibatkan persaingan.

Pertanyaannya, apakah dengan teori tersebut, telah terjadi imperialisme Belanda? Pertanyaan ini yang sebenarnya ingin dijawab Locher-Scholten di dalam *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial*.

Kesimpulannya, dapat diduga, Locher-Scholten menyepakati bahwa imperialisme Belanda dan praktik kolonial telah terjadi.

Dalam menjawab itu, Locher-Scholten memulai dengan pemaparan tentang perjanjian-perjanjian. Sejarah Jambi, kata dia, adalah sejarah serangkaian perjanjian. Karena struktur Kerajaan Jambi yang lemah, perjanjian-perjanjian itu mulus ditandatangani. Nyaris tak ada gejolak sebelum 1850-an, padahal perjanjian-perjanjian itu terang merugikan pihak Jambi; perjanjian terbaru lebih menekan dan merugikan Jambi serta menguntungkan Belanda. Sampai ketika Sultan Taha naik takhta pada 1855 yang ternyata menolak mematuhi semua perjanjian yang pernah dibuat. Belanda berang dan sebuah ekspedisi militer mengakhiri kekuasaannya secara formal pada 1858. Taha menyingkir ke pedalaman dan Belanda mengangkat sultan baru. Selama 50-an tahun Taha menerapkan strategi menghindar.

Perilaku menghindar terutama didasarkan pada ketakutan akan konfrontasi dan konsekuensi-konsekuensi konflik... respons semacam itu bisa jadi merentang dari sikap berlepas diri hingga adaptasi atau bahkan asimilasi secara lahiriah, dipadu dengan "perlawanan batin", pengembangan atau pelestarian identitas tersendiri.<sup>7</sup>

Namun,

Mode perlawanan yang dipilih Taha terbukti ampuh untuk waktu yang lama. Taktik mengelaknya menjadikan bentrokan mustahil terjadi, bahkan ketika pemerintah kolonial bernafsu melakukannya... Bentuk perlawanan ini bisa terus dilakukan sampai pemerintah kolonial menaikkan taruhan, menembus isolasi Taha dan mengubah hubungan itu menjadi konflik terbuka. Lalu Belanda terseret ke periferi—atau dalam istilah Fieldhouse, "tersedot ke dalam imperialisme oleh daya magnet periferi".<sup>8</sup>

Dengan topik tersebut, buku Locher-Scholten sesungguhnya telah menggabungkan antara ilmu sejarah dan ilmu sosial. Meski bukan sesuatu yang baru lagi, hal itu merupakan kecenderungan lanjut bahkan menjadi tren sejarah kontemporer, sebagai kritik atas pendekatan sejarah tuntas (*total history*) yang bersifat *scientific*. Dalam pendekatan yang disebut terakhir, yang berasal dari semangat positivisme Leopold van Ranke, sejarah bersifat *rigorous*, faktual, akurat, dan rekonstruktif atau berusaha menuturkan "apa yang telah

terjadi". Pertanyaannya, apa itu mungkin dilakukan?

Jauh sebelum kedatangan posmodernisme, telah banyak yang meragukan bahkan menyanggah bahwa sejarah dapat direkonstruksi sama seperti kejadiannya. Sebuah peristiwa yang telah lewat tak mungkin kembali lagi—ini pada gilirannya memicu perdebatan tentang kebenaran sejarah. Untuk melihatnya lagi, yang bisa dilakukan adalah memandangnya melalui perspektif, sama seperti pengetahuan yang tak pernah bisa total.<sup>9</sup> Inilah yang coba dilakukan oleh apa yang dalam historiografi disebut aliran *The New History* (1912) di Amerika dan aliran *Annales* (1929) di Prancis ketika mengusulkan kooperasi ilmu sosial dan ilmu sejarah.<sup>10</sup> Di Indonesia, yang pertama menganjurkan kooperasi antara ilmu sejarah dan ilmu sosial adalah Sartono Kartodirdjo. Sejarah hasil kooperasi ini kemudian dinamakan *social scientific history* atau *interdisciplinary history*.<sup>11</sup>

#### **D. Saifuddin atau Safiuddin?**

Yang menarik, di dalam *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial*, Locher-Scholten menulis "Sultan Taha Safiuddin". Tentu saja bagi masyarakat Jambi, nama itu berbeda dari yang selama ini dikenal, yakni Sultan Taha Saifuddin.<sup>12</sup>

Saya nyaris menyimpulkan bahwa "Safiuddin" hanyalah salah ketik, sebelum kemudian menyadari ternyata Locher-Scholten konsisten menggunakannya. Di sini perbandingan dengan edisi asli (sumber terjemahan) perlu dilakukan. Setelah edisi Inggris *Sumatran Sultanate and Colonial State: Jambi and the Rise of Dutch Imperialism, 1830-1907* (2004) dibuka, nyata di sana bahwa yang tertera adalah "Safiuddin". Sementara edisi Belanda yang merupakan sumber terjemahan untuk edisi Inggris, *Sumatraans sultanaat en koloniale staat: De relatie Djambi-Batavia (1830-1907)* (1994), menyebut dengan ejaan lama, yakni "Safioeddin". Karena konsistensi tersebut, yang timbul kemudian adalah keraguan: jangan-jangan memang "Safiuddin" yang benar!

Keraguan tersebut membawa kepada penelusuran karya-karya sejarawan "dunia", yakni bagaimana mereka menulis nama sultan

Jambi tersebut. Hasilnya tampak pada tabel berikut:

SEJARAWAN	SAIFUDDIN	SAFIUDDIN
Elsbeth Locher-Scholten	☒	☑
Jang Aisjah Muttalib	☒	☑
Barbara W. Andaya	☒	☑
Taufik Abdullah	☑	☒
M.C. Ricklefs	☑	☒

Kita lihat satu per satu tentang mereka. Pertama, dan yang menjadi soal kita, Elsbeth Locher-Scholten. Dia adalah pengajar pada Universiteit Utrech, Belanda. Selain menulis *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial*, dia juga menulis *Etika yang Berkeping-keping: Lima Telaah Kajian Aliran Etis dalam Politik Nasional 1877-1942* (1996), yang merupakan disertasinya di Universiteit Utrech. Di dalam *Etika yang Berkeping-keping*, dia juga menyinggung tentang Jambi ketika membahas Gubernur Jenderal Mr. J.P. Graaf van Limburg Stirum.<sup>13</sup> Karangan penting lainnya tentang Jambi adalah artikel “*The Establishment of Colonial Rule in Jambi: The Dual Strand of Politics and Economics*”,<sup>14</sup> yang membahas tentang kebangkitan kolonial di Jambi yang berangkat dari kepentingan politik dan ekonomi, dan “*Rivals and Rituals in Jambi-South Sumatra (1858-1901)*” yang dimuat dalam jurnal *Modern Asia Studies* 27 (1993).<sup>15</sup>

Kedua, Jang Aisjah Muttalib, mantan pengajar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang kini aktif di The Habibie Center. Minatnya tentang sejarah Jambi tampak pada disertasinya di Columbia University pada 1977 berjudul “*Jambi 1900-1916: From War to Rebellion*” dan artikel berjudul “*Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial di Jambi pada Perempatan Pertama Abad ke 20*”.<sup>16</sup> Kedua karya ini membahas tentang peralihan gerakan perlawanan terhadap kolonialisme dari penguasa kerajaan, yakni sultan, ke rakyat petani. Pembahasannya tentang pemberontakan Sarekat Abang pada 1916 menarik dilihat lebih lanjut karena, meski bukan khas Jambi, menggunakan motif Mesianisme. Kuntowijoyo



mengatakan, gerakan Mesianisme khas pada 1910-an, yang merupakan percampuran antara tradisi pedesaan dan magi serta pemujaan nenek moyang dan orang keramat.<sup>17</sup>

Ketiga, Barbara Watson Andaya, yang menulis *To Live as Brothers: Southeast Sumatra in Seventeenth and Eighteenth Centuries* (1993), yang membahas sejarah Sumatera Tenggara, yakni Palembang dan Jambi. Di buku tersebut, Barbara Andaya tersua menulis "Taha Safiuddin" dan tak sekali pun mencatat "Saifuddin" atau "Saifudin".<sup>18</sup> Artikel-artikelnya juga banyak membahas tentang Jambi, di antaranya "The Cloth Trade in Jambi and Palembang Society during the Seventeenth and Eighteenth Centuries"<sup>19</sup> dan "Cash Cropping and Upstream-Downstream Tension: The Case of Jambi in the Seventeenth and Eighteenth Centuries" (1993).

Keempat, Taufik Abdullah, sejarawan Indonesia. Satu-satunya tulisannya tentang Jambi adalah artikel berjudul "Reaksi terhadap Perluasan Kuasa Kolonial: Jambi dalam Perbandingan".<sup>20</sup> Kelima, M.C. Ricklefs, sejarawan yang kini mengajar di National University of Singapura (NUS). Dia adalah penulis *A History of Modern Indonesia*. Di buku inilah Ricklefs menyinggung tentang Jambi dalam bab 13 berjudul "The Outer Island, c. 1800-1910" dan menulis "Saifuddin".<sup>21</sup> Dan tahukah Anda, seberapa banyak dia membahas Jambi? Hanya satu paragraf atau 14 baris!

Apa yang bisa dilihat dari tabel tersebut dan penjelasannya? Yang terpenting dalam soal kita, sejarawan yang menulis "Safiuddin" adalah sejarawan yang memang secara mendalam menulis tentang Jambi atau menjadikan Jambi sebagai lapangan studi mayornya. Mereka menulis buku atau disertasi. Sementara sejarawan pendukung "Saifuddin" hanya sekilas membahas tentang Jambi semisal satu paragraf atau paling jauh satu artikel.

Bagaimana dengan penulis-penulis lainnya? Juga terjadi perbedaan soal penulisan antara "Saifuddin" dan "Safiuddin", termasuk buku tentang pahlawan-pahlawan Indonesia secara sekilas, yang biasanya untuk bahan bacaan siswa sekolah dasar.<sup>22</sup>

Selain memeriksa buku-buku sejarah, saya mengirimkan surat elektronik (surel, *e-mail*) kepada Elsbeth Locher-Scholten untuk

bertanya soal Saifuddin dan Safiuddin. Saya kutipkan balasan surel darinya pada 5 Juni 2010:

Menarik sekali bahwa nama sultan Taha dikenal sekarang seperti Saifuddin. Dalam sumber-sumber dalam arsip dan dalam buku-buku saya selalu betereamu dengan nama Taha Safioeddin atau Safiuddin. Hanya orang sejarawan Merle C. Riclefs juga menggunakan Saifuddin. Tetapi kalau saya men'google' nama Taha, kedua ada mungkin.

### **E. Suara Kolonial?**

Demi mencari kejelasan, saya juga melakukan wawancara-tak-mendalam dengan beberapa orang tentang buku Locher-Scholten. Kebanyakan mereka adalah pendidik atau orang terpelajar. Beberapa tentu saja menekuni topik sejarah. Jawaban mereka mengerucut pada satu hal: *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial* ditulis oleh sejarawan berkebangsaan Belanda dan sangat mungkin suara kolonial begitu kuat di dalamnya, apalagi sumber-sumber yang digunakan kebanyakan adalah arsip Belanda.

Pada pertengahan abad ke-20, kolonialisme bisa dikata telah runtuh dan tak ada lagi, ditandai dengan berdirinya Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) yang menjadi polisi dunia yang mencegah penjajahan atau imperialisme. Namun, bagi sejumlah ilmuwan kritis semisal Edward W. Said,<sup>23</sup> akhir era kolonialisme tak lain adalah awal bagi era penjajahan model baru. Penjajahan ini mengejawantah dalam segenap aspek kebudayaan modern, seperti mode, gaya hidup, ekonomi, film, media, pengetahuan, termasuk buku-buku (sejarah). Kritisisme terhadap penjajahan model baru ini dalam ilmu sosial dinamakan poskolonialisme.

Kelahiran poskolonialisme tak dapat dipisahkan dari pascamodernisme dan pascastrukturalisme. Peletak dasarnya adalah filsuf ateis Friedrich Nietzsche. Para tokoh penyebarannya antara lain Jacques Derrida dan Paul Michel Foucault. Aliran ini muncul dengan semangat mempertanyakan kebenaran; kebenaran mungkin ada, tapi tidak dapat atau mustahil direngkuh. Bagi mereka, dalam setiap klaim kebenaran, sesungguhnya bertakhta kekuasaan. Ada yang kemudian oleh Foucault disebut sebagai *power/knowledge*.

Demikian pula terkait sejarah. Menurut Foucault, sejarah tak

lain merupakan entitas-entitas yang berdiri sendiri dan antarperistiwa terlepas satu sama lain, tidak pernah terkait apalagi natural. Antarperistiwa yang terpisah itu berusaha dibuat berkesinambungan dan bergerak ke arah tertentu oleh sistem kuasa. Kekuasaan di sini berdiri di atas topangan penguasa, keilmuan tertentu (sejarah), atau cap pengakuan validitas atau legalitas. Sejarah, bagi Foucault, pada dasarnya merupakan retakan-retakan terpisah. Para sejarawan kemudian menggabungkan retakan-retakan itu dan menghaluskannya.<sup>24</sup> Dalam prosesi itu, sejarah dibawa oleh para sejarawan ke arah titik tertentu sesuai keinginannya. Di sini ada yang dinamakan dengan *episteme*. *Episteme* adalah pola pikir atau struktur nirsadar yang mengatur arah sejarah.<sup>25</sup>

Proses penghalusan itu, menurut Foucault, dilakukan dalam tiga tahap dan teknik. Tahapan ini menyangkut struktur dan potensi modal. Pertama, teknik pemilahan (*classification practices*). Di sini berbagai unsur sejarah dipilah-pilah dan dikelompok-kelompokkan. Kedua, teknik normalisasi (*dividing practices*). Sejarah yang telah dipilah-pilah tadi kemudian dinormalisasi. Ada kelompok sejarah yang dianggap normal, dan ada yang dianggap abnormal. Benar dan keliru. Ketiga, teknik pendisiplinan (*self-subjectivication practices*). Sejarah yang normal tadi dibuat sebagai sebuah disiplin. Disiplin itu dijaga layaknya penjagaan dalam penjara panoptikon, sehingga masyarakat selalu merasa diawasi untuk tidak membuat tafsir sejarah yang berbeda dengan disiplin itu.<sup>26</sup>

Dalam ketiga praktik itu, bertakhta kekuasaan, yang memegang segenap kendali potensi modalitas.<sup>27</sup> Namun kekuasaan dalam pandangan Foucault tidak bersifat terpusat, melainkan menyebar. Dia tidak hanya berada pada penguasa, melainkan ada dalam hubungan penguasa-rakyat. Kekuasaan juga menyebar di lembaga keilmuan, perpustakaan, klinik, dan lain sebagainya. Sejarah kemudian tak ubahnya sebuah imajinasi, yaitu imajinasi penguasa yang menggenggam modal. Sejarah di sini tak lain adalah cerita rekaan penguasa. Dengan kata lain, sejarah adalah fiksi penguasa (pengetahuan sejarah). Dalam konteks (pos)kolonialisme, sejarah ditulis dari perspektif penjajah.<sup>28</sup>

Karena itu, merevisi sejarah menjadi bagian penting dari proyek dekolonisasi. Linda Tuhiwai Smith, seorang penulis dan peneliti berkebangsaan Maori, menulis,

Mencari tahu tentang masa lalu adalah bagian dari pedagogi kritis dekolonisasi. Memiliki sejarah alternatif sama artinya dengan memiliki pengetahuan alternatif. Implikasi pedagogi pengetahuan alternatif akan membentuk basis alternatif menuntaskan segala macam masalah. Transformasi pandangan-pandangan terjajah kami terhadap sejarah kami sendiri—yang ditulis Barat—betapapun mewajibkan kami menziarahi situs demi situs dan sejarah di bawah kacamata Barat.<sup>29</sup>

Kalau bagi terjajah bukan hal mudah membalik sejarah sehingga membuah apa yang disebut Smith sebagai pengetahuan alternatif, bagi sejarawan dari bangsa bekas penjajah, menulis sejarah yang jujur juga tidak gampang. Di dalam sebuah bab buku *Dutch Culture Overseas*, sejarawan Frances Gouda yang merupakan anak seorang Belanda yang pernah bertugas di Hindia, mengisahkan bagaimana dilema itu menyelimuti sejarawan seperti dirinya.<sup>30</sup>

Locher-Scholten bukan tak menyadari hal tersebut, termasuk akan muncul anggapan suara kolonial yang mungkin dilekatkan padanya. Terlebih ketika dia tak menemukan sumber Melayu tentang topik yang dia tulis yang memadai. Semua dokumen yang ada di Jambi tentang bentuk-bentuk awal pemerintahan dan batas-batas dibakar Belanda ketika menyerbu istana Sultan Taha pada 1858. Yang tersisa, kata Locher-Scholten, hanya dua kitab undang-undang, beberapa legenda, silsilah sultan, dua kisah perang saudara pada dua dasawarsa pertama abad sebelumnya, serta beberapa uraian perjalanan Belanda ke Jambi yang berasal dari tahun 1852, 1861, dan 1878.<sup>31</sup>

Locher-Scholten sangat menyadari itu. Bahkan dia terang mengutip *Orientalisme*-nya Edward W. Said yang mengatakan bahwa “orang-orang Eropa, dalam hal ini Belanda, menilai penduduk lokal menurut standar mereka sendiri dan umumnya menulis laporan dan uraian sesuai kebijakan mereka.”<sup>32</sup>

Pertanyaannya, apakah *hanya* dengan sumber-sumber dari bangsa terjajah, sejarah nonkolonial bisa ditulis? Tentu saja tidak. Smith percaya bagaimanapun penulisan sejarah baru harus

dilakukan, dengan keterbatasan apa pun. Locher-Scholten bahkan sudah melakukannya. Dia sendiri mengkritik sejarah Jambi yang ditulis sejarawan Belanda sebelumnya, yakni Tideman dan Sigar (*Djambi*, 1938) serta E.B. Kielstra dan Hendrik Colijn, sebagai “penuh kekeliruan dan salah representasi... ditulis dari perspektif yang sama dan mengejar tujuan yang sama — membenarkan ekspansi kekuasaan Belanda atas Jambi.”<sup>33</sup>

Cara Locher-Scholten agar tak jatuh pada jebakan yang sama adalah dengan “menganut prinsip-prinsip keserjanaan modern dan... dari perspektif yang lebih Indonesia-sentris”.<sup>34</sup> Bagaimana itu dilakukan? Jawabannya dengan berlaku kritis terhadap sumber yang ada. Kata Locher-Scholten, “Kajian-kajian kolonial tradisional sudah lewat masa jayanya, mereka kini hanya berguna sebagai sumber bagi sejarawan kritis dan ilustrasi mentalitas kolonial.”<sup>35</sup> Bahkan karya sejarah kolonial-sentris pun, bagi Locher-Scholten, tetap berguna sebagai sumber, yakni ketika berada di tangan sejarawan kritis seperti dirinya.<sup>36</sup>

Sejarawan kritis, yang menghasilkan produk sejarah kritis, bagaimanapun mengingatkan pada Nietzsche. Dialah yang pertama mencetuskannya. Nietzsche sendiri membagi metode sejarah menjadi tiga, yakni sejarah monumental atau sejarah yang melihat peristiwa-peristiwa besar atau monumental dan metode antikuarian yang mirip pohon sejarah, yakni menulis sejarah berdasarkan *nasab* atau garis keturunan. Dua metode itu acap terjebak, dan menghasilkan, sejarah besar (*grande histoire*). Metode terakhir adalah sejarah kritis, yakni sejarah yang berupaya “memerkarakan masa lampau ke pengadilan, memeriksanya dengan saksama, dan akhirnya menghukumnya.”<sup>37</sup>

## **F. Penutup: Jambi di Pinggir Sejarah**

Kalau anggapan adanya suara kolonial tak tepat diterakan pada Locher-Scholten, yang harus dilakukan untuk memecahkan persoalan “Saifuddin” atau “Safiuddin” adalah bercermin diri: jangan-jangan memang ada kesalahan terkait sejarah di Jambi.

Dan bila itu dilakukan, rasanya yang akan ditemukan adalah kuatnya kecenderungan pinggiran atau periferi. Di awal, dalam

diskusi tentang teori imperialisme, telah jelas bahwa berada pada wilayah itu amat tidak menyenangkan. Sebagaimana telah disebutkan, persoalan Jambi sebagai periferi, berlawanan dengan Eropa sebagai pusat, membuat kolonialisme mampu menancapkan kuku kekuasaannya. Murid Derrida, Gayatri C. Spivak, dengan amat tepat membuat pertanyaan yang tak perlu lagi jawaban dalam sebuah esainya: *can the subaltern speak?*<sup>38</sup>

Apa yang ada di pinggir, apa yang ada di tengah? Jawabannya ada dua. Pertama, Jambi. Bisa dikata Jambi adalah wilayah yang paling jarang ditulis sejarahnya di Indonesia. Sejauh ini, setelah membaca *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial*, kita mungkin akan menyebut (hanya) ada tiga karangan sejarah tentang Jambi atau ada tiga sejarawan serius yang menulis Jambi: Jang Aisjah Muttalib dengan disertasi "Jambi 1900-1916: From War to Rebellion", Barbara Watson Andaya dengan *To Live as Brother*, dan Locher-Scholten dengan *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial*. Silakan bandingkan dengan sejarah daerah lain seperti Aceh, Sumatera Barat, Maluku, atau daerah lain yang telah ditulis dalam banyak karangan. Dengan kata lain, di pusran sejarah Indonesia, Jambi berada di pinggiran atau wilayah periferi.

Kedua, sejarah itu sendiri. Di Jambi, sejarah adalah sesuatu yang seolah terlupakan dan tak teperhatikan. Akan sangat kontras bila kita membandingkan dengan soal-soal lain seperti ekonomi, politik, atau perkebunan. Nyaris semua yang berbau sejarah di Jambi tinggal puing kenangan, dirobuhkan, dan diganti dengan rumah toko (ruko) yang menyiratkan kuatnya hasrat kapitalisme. Walhasil, banyak generasi sekarang yang tak tahu di menara air PDAM, di samping Masjid Al-Falah, adalah bekas istana Kerajaan Jambi yang disebut "Tanah Pilih". Pemerintah daerah lebih menggunakan wilayah itu sebagai kantor badan usaha daerah ketimbang cagar budaya.

Melihat kenyataan di atas, tampaknya upaya membawa sejarah Jambi ke tengah masih memerlukan waktu yang tak sebentar.[]

**Catatan:**

<sup>1</sup> Versi awal tulisan ini saya sampaikan dalam diskusi buku *Kesultanan*

*Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda* di Hotel Endotel, Jambi, pada Juli 2010, yang diselenggarakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Jambi. Saya mendapatkan tanggapan dari beberapa peserta, utamanya Fahrudin Saudagar (Universitas Jambi), Junaidi T. Noor (budayawan), dan Raden Sulaiman (pemangku adat). Selain kepada mereka, secara khusus saya menghaturkan terima kasih kepada Sdri. Paryatun di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang membantu menyediakan banyak bahan untuk keperluan penulisan artikel ini.

<sup>2</sup> Taufik Abdullah, "Reaksi terhadap Perluasan Kuasa Kolonial: Jambi dalam Perbandingan", *Prisma* 11 (1984), hlm. 13.

<sup>3</sup> Abdullah, "Reaksi terhadap", hlm. 16.

<sup>4</sup> Elsbeth Locher-Scholten, *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*, terj. Noor Cholis, (Jakarta: KITLV dan Banana, 2008), hlm. 17.

<sup>5</sup> Locher-Scholten, *Kesultanan Sumatra*, hlm. 23.

<sup>6</sup> Terjadi perdebatan tentang awal imperialisme modern. Ada yang berpendapat pada 1870 dan ada yang memandang 1880. Fieldhouse tampaknya menyepakati yang terakhir.

<sup>7</sup> Locher-Scholten, *Kesultanan Sumatra*, hlm. 258-259.

<sup>8</sup> Locher-Scholten, *Kesultanan Sumatra*, hlm. 259.

<sup>9</sup> Dalam lapangan ilmu, buku bagus yang mendiskusikan perspektif ini adalah A.F. Chalmers, *Apa itu yang Dinamakan Ilmu?* (Jakarta: Hasta Mitra, 1985).

<sup>10</sup> Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 118.

<sup>11</sup> Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah*, hlm. 118.

<sup>12</sup> Memang ada beberapa variasi penulisan nama pahlawan Jambi tersebut, misalnya Sultan (kadang ditulis Sulthan) Taha (ada yang menyebut Thaha) Saifuddin (Syiaifuddin).

<sup>13</sup> Locher-Scholten, *Etika yang Berkeping-keping: Lima Telaah Kajian Aliran Etis dalam Politik Nasional 1877-1942* (Jakarta: Djembatan, 1996), hlm. 77-83.

<sup>14</sup> Dalam J.Th. Lindblad (ed.), *Historical Foundation of a National Economy in Indonesia, 1890s-1990s*, (North-Holland, Amsterdam/Oxford/New York/Tokyo: KNAW, 1996), hlm. 137-151.

<sup>15</sup> Saya belum berhasil mendapatkan karangan ini. Karyanya yang lain yang saya punya adalah "Dutch Expansion in the Indonesian Archipelago around 1900 and the Imperialism Debate", *Journal of South East Asian Studies* 25 (1) (1994), hlm. 91-111, yang membahas secara umum tentang imperialisme Belanda di Nusantara berdasarkan tiga perdebatan dalam teori imperialisme yang telah dibahas di awal tulisan ini; dan "Pakaian Musim Panas dan Makanan Kaleng: Perempuan Eropa dan Gaya Hidup Barat di Hindia Tahun 1900-1942", dalam H. Schulte Nordholt (ed.), *Outward Appearances: Tren, Identitas, Kepentingan*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 221-265, yang menunjukkan bahwa Locher-Scholten juga memerhatikan sejarah kecil di Sumatera bagian selatan.

<sup>16</sup> Dalam *Prisma* 8 (1980), hlm. 26-37.

<sup>17</sup> Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah*, hlm. 102-103. Bandingkan dengan hlm. 104-108.

<sup>18</sup> Lihat Barbara Watson Andaya, *To Live as Brother: Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, (Honolulu: University of Hawaii Press, 1993), misalnya hlm. 247.

<sup>19</sup> Dalam *Indonesia* 48 (1989), hlm. 26-46.

<sup>20</sup> Taufik Abdullah, "Reaksi terhadap", hlm. 12-27.

<sup>21</sup> M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia*, (London: The Macmillan Press, 1982), hlm. 182.

<sup>22</sup> Saya sudah mulai menelusuri buku-buku tersebut. Namun, karena keterbatasan waktu, tak bisa dihadirkan dalam tulisan ini.

<sup>23</sup> Karya Edward W. Said yang menjadi awal kritisisme kolonialisme model baru ini adalah *Orientalisme*, (Jakarta: Pustaka, 1988) dan *Covering Islam*, (Yogyakarta: Jendela, 2002).

<sup>24</sup> Melihat retakan-retakan itu bisa dilakukan dengan dengan studi historiografi (*historiography*). Conal Furay dan Michael J. Salevouris mendefinisikan historiografi sebagai studi tentang cara sejarah ditulis. Lihat dalam *The Methods and Skills of History: A Practical Guide* (Harland Davidson, 2000), hlm. 223.

<sup>25</sup> Michel Foucault, *The Archeology of Knowledge*, (London: Routledge, 2004).

<sup>26</sup> Foucault, *The Archeology of Knowledge*; bandingkan dengan Gavin Kendall dan Gary Wickham, *Using Foucault's Methods*, (London-California-New Delhi: Sage Publications, 2003), terutama bagian pertama.

<sup>27</sup> Foucault, *The Archeology of Knowledge*, hlm. 38 dst.

<sup>28</sup> Bandingkan dengan Linda Tuhiwai Smith, *Dekolonisasi Metodologi*, terj. Nur Cholis, (Yogyakarta: Insist, 2005), hlm. 21 dan 29.

<sup>29</sup> Smith, *Dekolonisasi Metodologi*, hlm. 30.

<sup>30</sup> Lebih jauh baca bab pertama buku Frances Gouda, *Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942*, terj. Jugiarie Sugiarto dan Suma Riella Rusdiarti, (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 29-77 di bawah judul "Upaya Menyusun Kembali Hindia Belanda, 1900-1942".

<sup>31</sup> Locher-Scholten, *Kesultanan Sumatra*, hlm. 16.

<sup>32</sup> Locher-Scholten, *Kesultanan Sumatra*, hlm. 15.

<sup>33</sup> Locher-Scholten, *Kesultanan Sumatra*, hlm. 16-17.

<sup>34</sup> Locher-Scholten, *Kesultanan Sumatra*, hlm. 17.

<sup>35</sup> Locher-Scholten, *Kesultanan Sumatra*, hlm. 17.

<sup>36</sup> Locher-Scholten menyebut sejarawan kritis yang menulis tentang Jambi adalah Barbara Watson Andaya dan Jang Aisjah Muttalib.

<sup>37</sup> St. Sunardi, "Sejarah", dalam *Opera Tanpa Kata*, (Yogyakarta: Buku Baik, 2003), hlm. 49 dan seterusnya.

<sup>38</sup> Gayatri Chakravorty Spivak, "Can the Subaltern Speak?", dalam Cary Nelson dan Lawrence Grossberg (eds.), *Marxism and the Interpretation of Culture*, (London: MacMillan, 1988).



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, "Reaksi terhadap Perluasan Kuasa Kolonial: Jambi dalam Perbandingan", *Prisma* 11 (1984).
- Andaya, Barbara Watson, "The Cloth Trade in Jambi and Palembang Society during the Seventeenth and Eighteenth Centuries", *Indonesia* 48 (1989), hlm. 26-46.
- Andaya, Barbara Watson, *To Live as Brother: Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*, (Honolulu: University of Hawaii Press, 1993).
- Chalmers, A.F., *Apa itu yang Dinamakan Ilmu?* (Jakarta: Hasta Mitra, 1985).
- Foucault, Michel, *The Archeology of Knowledge*, (London: Routledge, 2004).
- Furay, Conal, dan Michael J. Salevouris, *The Methods and Skills of History: A Practical Guide* (Harland Davidson, 2000).
- Gouda, Frances, *Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942*, terj. Jugiarie Sugiarto dan Suma Riella Rusdiarti, (Jakarta: Serambi, 2007).
- Kendall, Gavin dan Gary Wickham, *Using Foucault's Methods*, (London-California-New Delhi: Sage Publications, 2003).
- Kuntowijoyo, *Penjelasan Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008).
- Lindblad, J.Th. (ed.), *Historical Foundation of a National Economy in Indonesia, 1890s-1990s*, (North-Holland, Amsterdam/Oxford/New York/Tokyo: KNAW, 1996).
- Locher-Scholten, Elsbeth, *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*, terj. Noor Cholis, (Jakarta: KITLV dan Banana, 2008).
- Muttalib, Jang Aisjah, "Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial di Jambi pada Perempatan Pertama Abad ke 20", *Prisma* 8 (1980).
- Ricklefs, M.C., *A History of Modern Indonesia*, (London: The Macmillan Press, 1982).
- Said, Edward W., *Covering Islam*, (Yogyakarta: Jendela, 2002).
- Said, Edward W., *Orientalisme*, (Jakarta: Pustaka, 1988).
- Smith, Linda Tuhuiwai, *Dekolonisasi Metodologi*, terj. Nur Cholis, (Yogyakarta: Insist, 2005).
- Sunardi, St., "Sejarah", dalam *Opera Tanpa Kata*, (Yogyakarta: Buku Baik, 2003).